

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pemerintah di berbagai negara telah menerapkan digitalisasi pemerintahan di era modern ini, yang telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan manusia ke arah yang lebih modern. Pemerintah di seluruh dunia ingin memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat mereka. Oleh karena itu, mereka membangun pemerintahan digital di mana warganya dapat mengakses informasi, berkomunikasi langsung dengan pemerintah, dan berpartisipasi dalam transaksi digital dan informasi. konversi digital untuk pengguna SPBE.

Menurut (Rachmatullah & Purwani, 2022) Sebelum undang-undang e-government nasional dibuat, atau bahkan sebelum program e-government menjadi prioritas utama di Indonesia, sistem e-government telah diimplementasikan secara bertahap. Saat ini, tahap persiapan, yang mencakup penyediaan perangkat pendukung fisik, pusat data, dan unit yang didedikasikan untuk melakukan pekerjaan tersebut, telah selesai. Langkah berikutnya adalah membangun sistem e-government. Periode ini sangat umum di lembaga pemerintah pusat. Salah satunya adalah Departemen Keuangan. Saat ini, pemerintah pusat mulai mempertimbangkan untuk memodernisasi secara menyeluruh perangkat dan teknologi layanan publik. Beberapa negara berkembang dan maju, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang, kemudian mengakui bahwa mereka terlambat dari jadwal. Untuk meningkatkan kualitas kompetitif, modernisasi pelayanan publik sangat penting. Tahap selanjutnya adalah mengesahkan berbagai

undang-undang dan peraturan nasional serta mendorong praktik terbaik untuk menerapkan e-government. Setelah penerapan peraturan perundang-undangan di bawah kriteria kedua, sistem e-government secara resmi diumumkan. Pemerintah pusat meminta pemerintah pusat dan daerah untuk membentuknya.

Menurut Wasistiono (2019) era digital telah membawa banyak perubahan besar pada kehidupan manusia dan mengubahnya ke arah yang lebih modern. Akibatnya, selama revolusi industri digital, banyak pemerintah di berbagai negara telah menerapkan digitalisasi dalam sistem pemerintahan mereka salah satunya adalah pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah. Karena konsep pelayanan publik digital dapat lebih efisien (Antoni, dkk, 2021). Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, Indonesia telah menerapkan digitalisasi dalam sistem pemerintahannya. dimana pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Perpres No.95 Tahun 2018)

E-government, juga dikenal sebagai pemerintahan elektronik, dan e-services, juga dikenal sebagai pelayanan elektronik, adalah hasil dari revolusi industri pelayanan pemerintahan digital Nugraha (2018). Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2018 mengatur sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah Indonesia telah menerapkan jenis pelayanan baru yang dikenal sebagai e-government, atau pemerintahan elektronik, dan e-services, yang merupakan implementasi dari pemerintahan digital. Menurut (Rachmatullah & Purwani, 2022) E-government didefinisikan sebagai

memanfaatkan digitalisasi dan teknologi informasi untuk meningkatkan penyampaian layanan publik kepada dunia usaha dan masyarakat. Salah satu definisi istilah “e-Government” adalah penyediaan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Di sisi lain, hal ini dianggap sebagai cara untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan konstituennya, seperti individu dan dunia usaha. Perkembangan e-Government mempunyai banyak manfaat. Hal ini memungkinkan korespondensi dua arah yang konsisten antara warga dan otoritas publik. Seperti banyak pemerintahan lainnya, pemerintah Indonesia menyadari manfaat dari e-Government, yaitu membuat layanan publik lebih mudah diakses dan transparan, serta membuat pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih transparan. Ada sejumlah alasan mengapa e-Government diperlukan di Indonesia: membantu perubahan menuju pemerintahan berbasis popularitas, membantu pengaruh keseluruhan di antara badan legislatif lokal dan lokal, melakukan korespondensi antar administrasi negara yang fokus dan teritorial, dan membantu perubahan menuju arah yang lebih baik. waktu masyarakat data.

Pemerintah Kota Tanjungbalai juga telah mengaplikasikan pelayanan publik secara elektronik (<https://portal.tanjungbalaikota.go.id>) Menurut (Yusriadi, 2018) Institusi didirikan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk mencapai tujuan. Administrasi pembangunan, atau administrasi pembangunan, adalah bagian dari administrasi publik. Proses pembangunan institusi tersebut disebut sebagai administrasi pembangunan. Sepanjang periode kemerdekaan Indonesia, birokrasi memiliki peran penting dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Selama masa orde baru, birokrasi juga berperan besar dalam proses pembangunan.

Namun, pengelolaan administrasi publik saat ini menghadapi tantangan untuk terus berubah karena fenomena globalisasi. Selain itu, birokrasi telah membantu menjalankan tugas pemerintahan seperti distribusi, proteksi, dan pelayanan publik. Birokrasi didefinisikan sebagai organisasi formal yang memiliki status dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, kompetensi yang sesuai dengan jabatan dan pekerjaan, semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan milik individu, dan sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. (Yusriadi, 2018) Pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi, tetapi sebagai pekerjaan rumah pemerintah dan stakeholder, masih ada hambatan. Karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat, perbaikan birokrasi sangat penting. Pertanyaan utama adalah bagaimana secara cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Perbaikan apapun yang dilakukan pasti terkait dengan layanan yang diberikan dalam birokrasi pemerintahan, baik dalam satu instansi maupun lintas instansi.

Fokus reformasi birokrasi adalah proses mengubah cara berpikir dan budaya untuk membuat tatanan birokrasi yang efektif dan efisien yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu kendala yang masih dihadapi dalam proses reformasi birokrasi adalah ketakutan pemerintah akan mengambil dan menanggung risiko yang mungkin terjadi sebagai dampak atau konsekuensi dari reformasi birokrasi itu sendiri. Karena menyangkut masalah kebiasaan, aparatur, dan sistem kerja dalam pelayanan, reformasi birokrasi sesungguhnya merupakan topik yang sangat sensitif dan

berbahaya. Problem ini kompleks karena berhubungan satu sama lain. Misalnya, karena otonomi daerah menjalankan sistem desentralisasi Indonesia, reformasi birokrasi harus mencapai tingkat daerah juga untuk mencegah ketimpangan di tingkat pusat. Namun demikian, ada kemungkinan besar bahwa Indonesia akan dapat membangun birokrasi yang ideal yang akan membentuk tata pemerintahan yang berfungsi dengan baik untuk kepentingan semua warganya. Pengembangan aplikasi e-Government, EKTP, E-Auction, Sisdiknas, Simkim, dan Siduga adalah terobosan penting dalam mengatasi hambatan tersebut. Indonesia harus memanfaatkan pertumbuhan teknologi informasi yang cepat untuk membuat layanan publik yang inovatif. Salah satu perubahan yang sangat mungkin adalah penggunaan teknologi informasi, yang akan menyempurnakan atau otomatisasi proses bisnis dalam segala aspek, diikuti dengan program manajemen perubahan.

Namun demikian, kenyataannya pertukaran data antar instansi itu masih banyak kelemahannya misalnya masih belum terstruktur dan belum memiliki pola kelemahan kelemahan itu antara lain dari segi standarisasi data (*Data standardization*), Pengelolaan data terpadu (*Unified data governance*), interoperabilitas teknis (*Technical interoperability*), akses data lintas lembaga (*Cross-agency data access*), sistem terhubung (*Interconnected systems*). Studi kasus ini mengambil Kota Tanjungbalai karena di kota ini pertukaran data masih mengandung kelemahan seperti yang sudah dijelaskan diatas yang dimana masih belum memiliki pola dan belum terstruktur sehingga proses pertukaran data di kota tanjungbalai masih memiliki kelemahan. Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mengikuti Evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2023 sesuai dengan jadwal undangan dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB). Interview ini mengevaluasi penilaian SPBE Pemerintah Kota Tanjungbalai pada tahun 2022, dan akan dikeluarkan nilai nya menjadi nilai SPBE tahun 2023. Tahun 2021 nilai SPBE kota Tanjungbalai sudah mencapai predikat baik, tetapi tahun 2022 mengalami penurunan ke predikat cukup, karena tidak ada pelaksanaan interview Evaluasi SPBE pada tahun 2022 tersebut. Kepala Dinas Kominfo yang menjadi lini sektor kegiatan ini, berharap nilai SPBE tahun ini akan meningkatkan menjadi baik. Kerjasama seluruh OPD/ tim sudah berusaha semaksimal mungkin. Setelah selesai interview, Asesor Eksternal yang ditunjuk MenpanRB berharap Pemerintah Kota melengkapi data dukung untuk melengkapi kelengkapan berkas pada indikator tertentu. Batas waktu pengisian data dukung hanya 5 hari setelah interview evaluasi SPBE tersebut. Menurut para ahli variabel-variabel independen yang berkemungkinan mempengaruhi pertukaran data antar organisasi itu antara lain, Peraturan, budaya organisasi, dan kepemimpinan.

1.2. Rumusan Masalah

Seberapa besar pengaruh Peraturan, budaya organisasi, dan kepemimpinan terhadap pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik di Kota Tanjungbalai 2023?

1.3.Tujuan Penelitian

Menjelaskan pengaruh Peraturan,budaya organisasi,dan kepemimpinan terhadap pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik di Kota Tanjungbalai 2023.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1.Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan,khususnya kajian keilmuan yang berkaitan dengan pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik di era digital.

1.4.2.Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi kebijakan pemerintah Kota Tanjungbalai,khususnya sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penataan kelembagaan (pertukaran data antar instansi) pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik di era digital.

1.5.Kajian Pustaka (Literature Review)

Studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik di Indonesia dapat dipetakan/dikategorikan/diklasifikasikan (taksonomi) sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Temuan
1.	Indri Koesnadi (2022)	Tata Kelola Interoperabilitas Data Aplikasi	Terwujudnya tata Kelola interoperabilitas data akan memudahkan pemahaman pengguna aplikasi dan penyedia aplikasi dalam melakukan interoperabilitas data sehingga menghasilkan keterpaduan informasi mulai dari penyelenggaraan pengolahan data di Kabupaten/Kota – Provinsi sampai dengan Pemerintah Pusat.
2.	Sandi Mahardi, M. Adi Kuncoro, dan Anto Siswanto (2020)	Integrasi Data Sektoral Pemerintah	Penelitian ini akan membahas aspek-aspek yang terkait dengan proses integrasi data sektoral pemerintah karena ada banyak sumber data yang berbeda yang memiliki model, skema, dan metode pengumpulan data yang berbeda. Penelitian ini akan membahas masalah perbedaan data sektoral pemerintah yang menyulitkan proses pengambilan kebijakan di lingkungan pimpinan tinggi pemerintah.
3.	Eko Wiyatnanto, Arief Indriarto Haris (2021)	Kinerja Arsitektur Interoperabilitas Menggunakan <i>Government Service Bus (GSB)</i> dan <i>Peer to Peers (P2P)</i>	Peran arsitektur interoperabilitas adalah salah satu solusi masalah redundansi data dan perbedaan data yang menyebabkan tingkat keakuratan data di bawah. Namun, kinerjanya arsitektur interoperabilitas perlu dievaluasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas aplikasi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi interoperabilitas arsitektur antar arsitektur menggunakan Bus Layanan Pemerintah (GSB) dan Peer to Peer (P2P), melalui beberapa pengujian yaitu pengujian beban dan pengujian tegangan pengujian. Pengujian beban dan pengujian stres bertujuan untuk mengukur kecepatan dan ketahanan aplikasi dengan mengirimkan permintaan dan mengukur respons aplikasi.
4.	Devita Ayu Wulandari, Irfan Darmawan, dan Ridha Hanafi (2020)	Analisis dan Perancangan Enterprise Architecture Sistem Satu Data Pada Fungsi Wajib Berkaitan	Inisiatif Satu Data pemerintah Indonesia bertujuan untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mencapai hal tersebut, data pemerintah harus akurat, terbuka, dan dapat diakses. Dengan demikian, penggunaan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan internal antara

		Pelayanan Dasar Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Menggunakan Togaf ADM	lembaga, tetapi juga memenuhi kebutuhan data publik. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sadar bahwa integrasi data pembangunan belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi. Daya saing dan transformasi bisnis membutuhkan Enterprise Architecture (EA).
5.	Muhammad Tajuddin, Adam Bachtiar Maulachela (2021)	Integrasi dan Interoperabilitas Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Menggunakan <i>Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) Method</i>	Di Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, transformasi digital berfokus pada layanan, dengan fokus pada penyediaan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi. Ini sesuai dengan rencana untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang direncanakan oleh Pemkot Mataram. Oleh karena itu, sebagai sektor utama dalam kegiatan layanan publik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Mataram diwajibkan untuk menerapkan SPBE untuk menciptakan keterpaduan layanan. OPD telah menerapkan teknologi informasi dalam kegiatan layanan publiknya.
6.	Rizqiyatul Khoiriyah (2022)	Analisis Implementasi <i>Electronical Digital Information System (E-Digis)</i> Dalam Proses Manajemen Data Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan telah melakukan terobosan dalam memberikan layanan publik dengan menerapkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data dan informasi. Aplikasi E-Digis adalah salah satu contoh penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik.
7.	Muhammad Nur Fajar (2023)	Tantangan Tata Kelola Interoperabilitas Dalam Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan Sebagai Upaya Mendukung Program Satu Data Indonesia	Kajian ini dilakukan untuk melihat tantangan dalam mengembangkan tata kelola interoperabilitas pada Sistem Informasi Prodeskel sebagai upaya mendukung Program SDI, dan menemukan bahwa Untuk menciptakan tata kelola interoperabilitas baik dari sisi, ada banyak hambatan. interoperabilitas Hukum, sistematis, semantik, dan teknis

8.	Reno Anthus, Ilhamsyah, dan Dian Prawira (2020)	Rancang Bangun Sistem Informasi Peringatan Dini Kejadian Luar biasa Menggunakan Model Interoperabilitas dan Arsitektur Rest	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan memiliki sistem yang berbeda, sektoral, dan heterogen. Akibatnya, data dari kedua sistem tersebut tidak dapat saling bertukar. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kedua sistem bekerja pada platform yang berbeda—desktop dan berbasis web—sehingga pertukaran data tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, sebuah web service diperlukan untuk memastikan bahwa sistem lain, terlepas dari platform atau sistem operasinya, dapat mengakses data.
9.	Nugroho Setio Wibowo, Ema Utami, dan Hanif Al Fatta (2021)	Perancangan Struktur Tata Kelola Data di Pemerintah Daerah Menggunakan Framework <i>Data Management Body Of Knowledge</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur tatakelola data, peran tatakelola data dalam struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Trenggalek, aktivitas tatakelola data, dan pemetaan solusi 18 masalah data di pemerintah Kabupaten Trenggalek menggunakan DMBOK. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode tatakelola data yang didasarkan pada DMBOK dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah data.
10.	Prasetya (2022)	Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Kabupaten Ciamis)	Untuk menghasilkan data pemerintah yang baik, Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah. Semua lembaga pemerintah, termasuk lembaga pemerintah daerah, diwajibkan untuk mengimplementasikan SDI sesuai dengan Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang SDI.

Namun demikian studi-studi dan penelitian-penelitian terdahulu itu kurang memperhatikan faktor-faktor (variable-variabel) Peraturan, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan sebelumnya kurang memperhatikan faktor-faktor Peraturan, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Karena penelitian terdahulu membahas dan menjelaskan tantangan tata kelola interoperabilitas dan

tantangan implementasi satu data Indonesia di pemerintah daerah yang artinya penelitian terdahulu ini lebih mengarah terhadap tata kelola yang dijalankan dan direalisasikan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya serta penelitian ini berfokus pada faktor-faktor (variable-variable) Peraturan, budaya organisasi, kepemimpinan yang diduga mempengaruhi pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik dan penelitian ini begitu berbeda dengan dengan penelitian sebelumnya yang mengarah terhadap satu data dan penelitian ini mengarah terhadap pertukaran data.

1.6. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menganut teori institusional (*Institutional Theory*). Teori ini mengatakan bahwa fungsi fungsi instansi mempengaruhi pertukaran data antar instansi. Menurut teori ini, variable-variable yang mempengaruhi pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah (*Interoperability of inter-agency data in local government*) meliputi:

1. Peraturan (*Existing rules*)
2. Budaya organisasi (*Organizational culture*)
3. Kepemimpinan (*Leadership*)

1.6.1. Pertukaran data antar instansi (Interoperability of inter-agency data)

Interoperabilitas berarti bahwa dua atau lebih sistem informasi tidak hanya dapat bertukar informasi, tetapi juga dapat menggunakan informasi yang dipertukarkan. Sistem Elektronik adalah sekumpulan perangkat dan prosedur elektronik yang digunakan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik untuk memungkinkan interoperabilitas. Data dapat didefinisikan sebagai catatan tentang kumpulan fakta atau deskripsi yang terdiri dari angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi. Mereka juga dapat menunjukkan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, situasi, atau keadaan.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi data secara terintegrasi. Karakteristik sistem elektronik tertentu termasuk komponen, batasan, lingkungan, lokasi geografis, antarmuka, masukan, keluaran, proses, bentuk, format, jenis, dan fungsi. Layanan Interoperabilitas Data yang disingkat LID adalah layanan yang disediakan oleh sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi data secara terintegrasi. Melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan dikenal sebagai akses. Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga lainnya dianggap sebagai institusi pusat. Menurut (Wiyatnanto & Haris, 2021) Kemampuan berbagai sistem dan aplikasi IT untuk berkomunikasi satu sama lain dikenal sebagai

interoperabilitas organisasi. Dengan kata lain, pada akhirnya, perangkat yang ada akan memiliki kemampuan untuk bertukar dan memahami informasi yang dikirim satu sama lain. Konsep ini memungkinkan sistem informasi saat ini berkolaborasi di luar batas organisasi. Ini akan meningkatkan kinerja pelayanan saat ini, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membuka pintu untuk potensi lain yang dapat dieksplorasi ke depannya. Mereka mengharapkan informasi yang mereka miliki dapat diakses secara bebas lintas institusi melalui penyimpanan data digital. Interoperabilitas menjadi semakin populer, dan banyak organisasi dan pemerintahan mulai menerapkannya karena keuntungan ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik mencakup segi standarisasi data (*Data standardization*), Pengelolaan data terpadu (*Unified data governance*), interoperabilitas teknis (*Technical interoperability*), akses data lintas lembaga (*Cross-agency data access*), sistem terhubung (*Interconnected systems*).

1.6.2. Peraturan (*Existing rules*)

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada norma dan sanksi yang disepakati. Untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan, hukum dibuat. Peraturan hukum tidak berlaku untuk semua negara, termasuk Indonesia. Pasa 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan setiap orang yang tinggal di sana harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum di setiap negara adalah peraturan yang secara adat dan resmi

dianggap mengikat dan diresmikan oleh penguasa atau pemerintah negara tersebut. Di Indonesia, ada banyak hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Warga negara Indonesia yang tidak mematuhi peraturan ini dapat dikenakan sanksi, yang dapat berupa penjara atau denda. Berikut adalah ringkasan tentang hukum, termasuk pengertian, tujuan, fungsi, dan unsurnya. Peraturan adalah aturan yang mengikat setiap anggota masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima. Setiap anggota masyarakat harus mematuhi aturan yang berlaku atau ukuran, standar yang digunakan sebagai standar untuk membandingkan dan menilai sesuatu.

1.6.3. Budaya Organisasi (*Organizational culture*)

Sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, dan norma yang ditetapkan, disepakati, dan dipatuhi oleh sumber daya manusia di dalam organisasi disebut sebagai budaya organisasi. atau arahan dan solusi untuk masalah organisasi. Budaya organisasi, di sisi lain, adalah kekuatan sosial yang tidak terlihat yang dapat mendorong anggota organisasi untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Semua pekerja secara tidak sadar belajar tentang budaya perusahaan. (Sudarsono, 2019) Tidak diragukan lagi, setiap organisasi, apapun jenisnya dan tingkatannya, memiliki pengalaman yang berbeda dan persamaan dalam situasi tertentu saat membangun budaya.

Ini menunjukkan bahwa ada dinamisasi dalam sebuah organisasi ketika budaya organisasi dibangun sebagai pedoman dan prinsip yang diterapkan oleh

setiap anggota staf untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalaman yang dialami oleh sebuah organisasi terdiri dari kegagalan dan kesuksesan; kegagalan dapat disebabkan oleh konsep yang salah, sementara kesuksesan dapat disebabkan oleh konsep yang tepat untuk menjalankan organisasi. Pengalaman ini merupakan komponen penting dalam pembentukan budaya organisasi. Dengan demikian, setiap orang yang memegang jabatan pemimpin dalam sebuah organisasi harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi budaya yang paling cocok untuk organisasi mereka sehingga mereka dapat membangun budaya yang dapat menopang kinerja yang lebih baik dan membawa organisasi menuju kesuksesan di masa depan.

Dengan memberi mereka perasaan memiliki, loyalitas, kepercayaan diri, dan nilai-nilai, budaya organisasi akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan mendorong mereka untuk berpikir positif tentang organisasi. Budaya organisasi mencakup aspek yang lebih dalam dan merupakan dasar untuk menciptakan lingkungan kerja yang ideal. “Budaya organisasi sebagai nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan memengaruhi cara bertindak” (Robbins dan Coulter, 2012:80). Menurut (Luthans, (2011:137)) “Budaya organisasi adalah pola pemikiran dasar yang diajarkan kepada personel baru sebagai cara untuk merasakan, berpikir dan bertindak secara benar dari hari kehari”.

1.6.4. Kepemimpinan (*Leadership*)

Menurut Stogdill dalam (Husaini, 2019) Seseorang yang memiliki kemampuan untuk memandu bawahannya atau organisasi untuk mencapai tujuan yang sama disebut sebagai pemimpin. Di antara definisi kepemimpinan adalah titik fokus proses kelompok, kepribadian dan pengaruhnya, seni untuk memenuhi bujukan, latihan mempengaruhi, tindakan, bentuk membujuk, kekuatan hubungan, instrumen untuk mencapai tujuan, efek interaksi, perbedaan peran, dan awal struktur. Tulungen (2020) mengatakan bahwa peran kepemimpinan dalam menerapkan pemerintahan digital sangat penting untuk mengubah sektor pemerintahan menjadi digital. Menurut Hesty, *et al* (2020) Faktor kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintah digital melalui pertukaran data. Seorang pemimpin memiliki otoritas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kepemimpinan dapat didefinisikan dalam dua cara: sebagai kekuatan untuk mempengaruhi orang dalam kelompok. Kepemimpinan adalah cara terbaik untuk mendorong orang untuk melakukan sesuatu secara sukarela. Orang dapat digerakkan oleh banyak hal, seperti ancaman, penghargaan, dan otoritas yang diberikan kepada mereka dalam keluarga mereka. Proses mengarahkan kelompok untuk mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok dikenal sebagai kepemimpinan. Berikut ini adalah tiga definisi yang sangat penting:

- (1) Kepemimpinan melibatkan orang lain, baik bawahan maupun pengikut;

(2) kepemimpinan memastikan bahwa kekuatan dibagi secara seimbang antara pemimpin clan dan anggota kelompok, karena anggota kelompok bukan tanpa kekuatan; dan

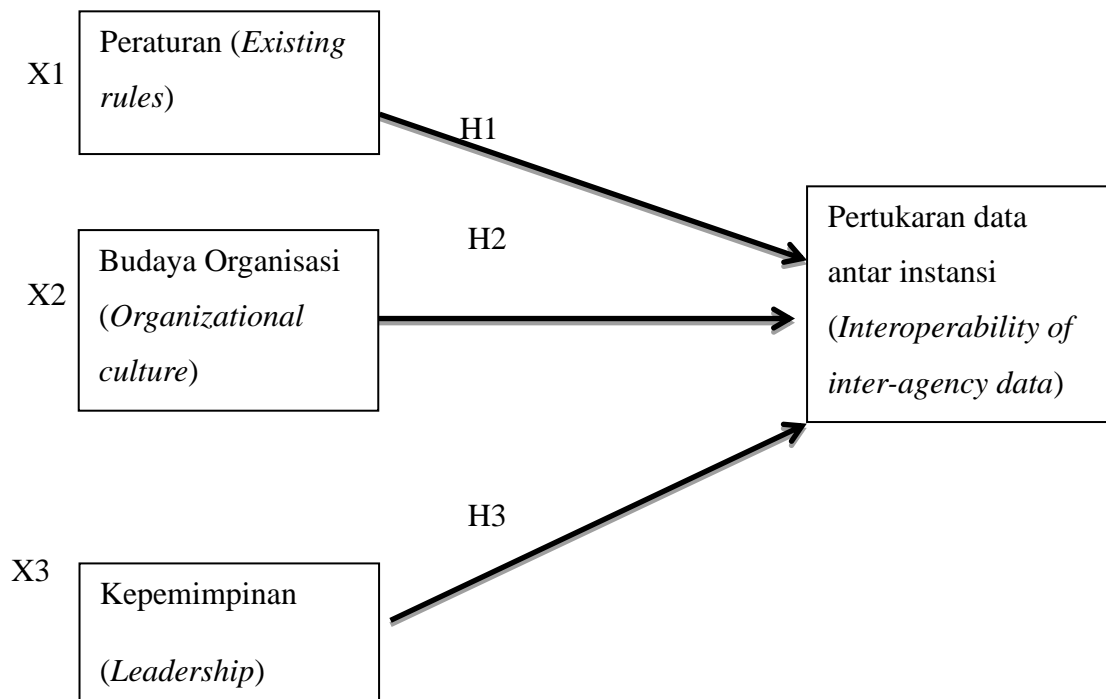
(3) ada kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi clan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, dan kehormatan clan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan juga merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi clan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengaruh dapat berasal dari sumber yang tidak formal atau formal. Sumber yang formal berasal dari posisi manajemen seorang pemimpin dalam organisasi, sementara sumber yang tidak formal berasal dari lingkungan di luar struktur organisasi formal. Seorang pemimpin dapat berasal dari organisasi atau ditunjuk secara formal.

Untuk membuat program kerja yang menarik bagi anggotanya, pemimpin kelompok atau organisasi harus kreatif. Dalam situasi ini, peran pemimpin sangat penting dalam menentukan arah gerak atau tujuan kelompok sesuai dengan visi dan misi kelompok. Program kerja yang dirancang diharapkan dapat mendukung visi dan misi. Pemimpin memiliki otoritas dalam menjalankan tugas untuk memberikan pengarahan kepada anggotanya agar melaksanakan program dengan

baik untuk mencapai tujuan bersama dan meminimalkan kelalaian. Kinerja seorang pemimpin pasti akan mempengaruhi kinerja setiap anggota tim. Salah satu cara seorang pemimpin melibatkan karyawannya dalam menyelesaikan masalah adalah meminta mereka untuk melaporkan apa yang terjadi dalam organisasi atau sistem. yang akan dievaluasi secara menyeluruh melalui evaluasi bersama.

Kerangka Teoritik



1.7.Hipotesa

1.7.1. Peraturan (*Existing rules*) mempengaruhi pertukaran data antar instansi (*Interoperability of inter-agency data*) secara positif dan signifikan.

1.7.2. Budaya organisasi (*Organizational culture*) mempengaruhi pertukaran data antar instansi (*Interoperability of inter-agency data*) secara positif dan signifikan.

1.7.3. Kepemimpinan (*Leadership*) mempengaruhi pertukaran data antar instansi (*Interoperability of inter-agency data*) secara positif dan signifikan.

1.8.Definisi Konsep dan Operasional

1.8.1.Definisi Konsep

1.8.1.1. Pertukaran data antar instansi (*Interoperability of inter-agency data*)

Interoperabilitas adalah kemampuan aplikasi dan sistem untuk berbagi data secara aman dan otomatis tanpa memperhatikan batas politik, geografis, atau organisasi. Berbagi atau pertukaran data yang terkoordinasi di seluruh departemen dan organisasi di beberapa industri sangat penting untuk penelitian dan pengembangan dan untuk meningkatkan pengalaman pengguna akhir. Interoperabilitas adalah istilah yang mengacu pada standar, protokol, teknologi, dan mekanisme yang memungkinkan data mengalir antara berbagai sistem tanpa intervensi manusia. Dengan cara ini, berbagai sistem dapat berkomunikasi satu sama lain dan berbagi data secara langsung. Solusi interoperabilitas mengurangi silo data dan membantu organisasi berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan industri. Ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan layanan yang lebih baik.

1.8.1.2. Peraturan (*Existing rules*)

Peraturan adalah aturan yang mengikat seluruh anggota masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Setiap anggota masyarakat diwajibkan untuk mematuhi aturan yang berlaku atau ukuran, yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu dengan yang lain.

1.8.1.3. Budaya organisasi (*Organizational culture*)

Budaya Organisasi adalah Sistem nilai-nilai (values), keyakinan-keyakinan (beliefs), asumsi-asumsi (assumptions), dan norma yang telah disepakati dan diikuti oleh sumber daya manusia di sebuah organisasi dikenal sebagai budaya organisasi. Ini berfungsi sebagai prinsip atau pedoman untuk memecahkan masalah yang muncul dalam organisasi. Tidak diragukan lagi, setiap organisasi, apapun jenisnya dan tingkatannya, memiliki pengalaman yang berbeda dan persamaan dalam situasi tertentu saat membangun budaya.

1.8.1.4. Kepemimpinan (*Leadership*)

Kepemimpinan adalah jiwa yang dimiliki oleh Seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi maupun dapat dipercaya, serta membawa suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dikenal sebagai pemimpin yang diberikan ataupun mendapatkan kepercayaan publik.

1.8.2. Definisi Operasional

1.8.2.1. Indikator pertukaran data antar instansi (*Interoperability of inter-agency data*) meliputi

- a.) Standarisasi data (*Data standardization*)
- b.) Pengelolaan data terpadu (*Unified data governance*)
- c.) Interoperabilitas teknis (*Technical interoperability*)
- d.) Akses data lintas lembaga (*Cross-agency data access*)
- e.) Sistem terhubung (*Interconnected systems*)

1.8.2.2. Indikator Peraturan (*Existing rules*) meliputi

- a.) Perjanjian formal atau protokol (*Formal agreements or memoranda of understanding*)
- b.) Aturan infrastruktur teknologi bersama (*Shared technological infrastructure rules*)

1.8.2.3. Indikator budaya organisasi (*Organizational culture*) meliputi

- a.) Norma dan keyakinan bersama (*Norms and shared beliefs*)
- b.) Praktik kolaboratif (*Collaborative practices*)
- c.) Penerapan praktik dan standar umum (*Adoption of common practices*)

1.8.2.4. Indikator kepemimpinan (*Leadership*) meliputi

- a.) Pendukung normatif isomorfisme (*Normative isomorphism advocacy*)
- b.) Penegakan isomorfisme kekuasaan (*Coercive isomorphism enforcement*)
- c.) Inovasi isomorfisme mimik (*Mimetic isomorphism innovation*)

Dari setiap masing masing variabel diatas memiliki parameter yang cukup signifikan dan juga memiliki indikator masing-masing yang dimana indikator tersebut merupakan perkembangan teori institusional dan Teori ini mengatakan bahwa fungsi fungsi instansi mempengaruhi pertukaran data antar instansi. Menurut teori ini, variable-variable yang mempengaruhi pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah (*Interoperability of inter-agency data in local government*).

1.9. Metodologi Penelitian

1.9.1. Tipe penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh Peraturan, budaya organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap bagaimana pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah mendukung pelayanan publik berbasis elektronik (studi kasus di dinas tenaga kerja kota Tanjungbalai 2023). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Metode ini

adalah studi tentang masalah sosial yang didasarkan pada hasil uji teori yang terdiri dari beberapa variabel. Hasil uji teori ini dievaluasi menggunakan teknik statistik untuk menentukan apakah generalisasi ide-ide tersebut benar atau salah. (Cresswell, 2017). Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian, baik alami maupun buatan. Beberapa proses pengukuran digunakan, termasuk mengajukan pertanyaan kepada responden dan mengumpulkan data sampel tambahan dari representasi dari berbagai kelompok.

1.9.2. Populasi (N) dan Sample (n)

Menurut (S Zein1 *et.al* 2019) Populasi adalah area generalisasi di mana subjek dan obyek penelitian terdiri dari kualitas dan fitur tertentu yang dituju oleh peneliti. Penelitian ini menargetkan pegawai Dinas Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah Kota Tanjungbalai pada tahun 2023. Selanjutnya adalah sampel, yang merupakan sebagian dari objek yang dimaksudkan untuk penelitian dan dapat dianggap sebagai representasi dari populasi saat ini. Sampel juga dapat merupakan sebagian kecil populasi yang ditunjukkan dengan metode tertentu, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mewakili populasi tersebut. Metode sampling sederhana digunakan dalam penelitian ini Suwardi *et al.* (2018).

Menurut Creswell (2017) Metode Teknik Purposive sampling melibatkan penyebaran kuisioner kepada peserta setelah menentukan karakteristik yang akan digunakan sebagai sampel penelitian sambil mempertahankan elemen

representatif. Teknik ini digunakan karena populasinya homogen, yaitu pegawai Dinas Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terlibat dan mengetahui pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik. Menurut informasi dan pra survey yang telah saya lakukan terdapat total 100 orang pegawai sebagai responden yang terdiri dari 25 pegawai Dinas Ketenagakerjaan, 20 pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 25 Pegawai Dinas Sosial dan 30 Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terlibat serta mengetahui secara langsung pertukaran data antar instansi pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik.

1.9.3. Teknik Pengumpulan data

Menurut S Zein¹, et.al (2019) Pengambilan data atau proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi, peristiwa, dan lokasi tertentu dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Data primer penelitian terdiri dari kuisisioner, yang juga merupakan metode pengumpulan data untuk studi survei. Kuisisioner adalah pengumpulan data primer yang dilakukan dengan menggunakan item penataan atau pertanyaan yang sudah dibuatkan dalam format tertentu. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini (Febrianawati Yusup 2018). Oleh karena itu, penelitian ini mengirimkan kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pertukaran data antar instansi pemerintah daerah di Kota Tanjungbalai untuk mendukung layanan publik elektronik. Kuesioner dibuat dalam bentuk kombinasi formulir Google yang

dikirimkan secara elektronik ke responden dan printout yang dikirimkan secara manual ke responden.

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan secara purposive (*purposive sampling*). Artinya, peneliti menyebarkan kuesioner kepada pegawai dinas dan *stakeholders* yang berpartisipasi maupun yang terlibat dalam proses pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah, khususnya dinas tenaga kerja dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik di Kota Tanjungbalai.

Peneliti melengkapi teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *stakeholders* yang benar-benar tahu dalam proses pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah, khususnya dinas tenaga kerja, dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik di Kota Tanjungbalai. Peneliti mendapatkan dokumen berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, dan berita media masa dan media online yang berkaitan dengan pertukaran data antar instansi di pemerintah daerah.

1.9.4. Instrumen dan Pengukuran data penelitian

Menurut Febrianawati Yusup (2018) Alat penelitian adalah bagian penting dari proses pengumpulan data. Saat pengambilan data, validitas dan reliabilitas instrumen akan ditentukan; hanya dengan mengetahui apakah instrumen tersebut valid atau tidak, data yang dihasilkan akan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan instrumen yang disebut kuisisioner tertutup; kuisisioner diberikan kepada responden dalam bentuk yang memungkinkan mereka hanya

memilih jawaban yang telah diberikan oleh peneliti. Setelah mengukur data, peneliti menganalisis tanggapan responden dari angket dengan skala Likert. menggunakan skala likert, yang merupakan skala psikometrik yang biasa digunakan Suwardi et al. (2018) Pada penelitian ini skala likertnya yaitu

1 sangat tidak setuju (sangat tidak benar kenyataannya)

2 tidak setuju (tidak benar kenyataannya)

3 netral (agak benar kenyataannya)

4 setuju (benar kenyataannya)

5 sangat setuju (sangat benar kenyataannya)

Pengukuran skala likert ini digunakan dalam pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang nantinya akan digunakan dalam analisis data dan pembahasan

1.9.5. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari temuan yang telah didapatkan oleh peneliti. Metode analisis bervariasi tergantung pada jenis variabel yang dianalisis Creswell (2017). Penelitian ini akan menganalisis hubungan tiga variabel dalam pengimplementasian pelayanan publik berbasis elektronik: Peraturan (x1), budaya organisasi (x2), dan kepemimpinan (x3) dengan pertukaran data antar instansi pemerintah daerah (y). Selain itu, penelitian ini akan menghitung validitas dan kredibilitas serta menguji regresi dan hipotesis yang digunakan untuk menganalisis hubungan lebih dari dua variabel.

Menurut Ningsih and Dukalang (2019) Analisis regresi linier berganda digunakan secara bersamaan untuk melihat bagaimana pengaruh dua atau lebih variabel yang mempengaruhi (x) terhadap satu variabel yang dipengaruhi (y) dengan skala interval. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan SEM-PLS, yang merupakan salah satu klasifikasi model SEM. Tujuan dari SEM-PLS adalah untuk memprediksi pengaruh variabel X pada variabel Y dan menjelaskan hubungan teoritis antara kedua variabel. Peneliti melakukan uji regresi pada data yang mereka buat dan olah dengan SEM-PLS. Uji regresi adalah proses menguji validitas dan reliabilitas data untuk menentukan apakah kesimpulan data dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, SEM-PLS sangat bermanfaat untuk uji regresi Martono, Yuwono, and Rahardjo (2014). Menurut Creswell (2017) Validitas yang dimaksudkan untuk peneliti akan dapat membuat kesimpulan yang bermanfaat dari kuisisioner yang telah disebar apakah sudah memenuhi kriteria dan mengukur apakah sudah sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti. Selain itu, reliabilitas dapat menunjukkan seberapa dapat diandalkan dan dapat dipercaya alat pengukur.